



Dampak Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang

Pristy Marvenci Manu¹, Jeni J. Therik², Cataryn V. Adam³, Petrus Kase⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Nusa Cendana

Email:

¹venimanu2000@gmail.com,

²jenitherik@gmail.com,

³adamcatrynn@gmail.com,

⁴kasepetrus@gmail.com

Abstrak

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang krusial dan terus berkembang di Indonesia, termasuk di Kota Kupang. Peningkatan volume sampah yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai telah menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, tempat beroperasinya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan TPA terhadap lingkungan fisik, kesehatan, dan sosial masyarakat sekitar. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di TPA Alak yang masih menggunakan metode *open dumping* telah menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air, serta mengganggu kenyamanan warga akibat bau menyengat, kebisingan, dan tingginya lalu lintas truk sampah. Dampak tersebut berkontribusi pada meningkatnya risiko gangguan kesehatan dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya intervensi aktif dari pemerintah dalam penguatan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan serta pelibatan masyarakat secara partisipatif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan tempat tinggal mereka.

Keywords: Tempat Pembuangan Akhir, Lingkungan, Kesehatan, Masyarakat, Sampah

Abstract

The waste problem is a crucial and growing environmental issue in Indonesia, including in Kupang City. The increase in waste volume that is not balanced by an adequate management system has had a significant impact on the environment and the quality of life of the community, especially in the Manulai II Village area, Alak District, where the Alak Final Disposal Site (TPA) operates. This study aims to analyze the impact of the TPA on the physical environment, health, and social aspects of the surrounding community. The method used is a qualitative approach

with a case study type. Data collection techniques were carried out through direct observation, in-depth interviews, and documentation, and were analyzed through the processes of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data validity was tested using source triangulation techniques. The results of the study indicate that the waste management system at the Alak TPA, which still uses the open dumping method, has caused air, soil, and water pollution, and disturbed the comfort of residents due to pungent odors, noise, and high garbage truck traffic. These impacts contribute to an increased risk of health problems and a decline in the community's quality of life. The conclusions of this study emphasize the need for active government intervention in strengthening environmentally friendly waste management systems and participatory community involvement in maintaining the sustainability of their residential environment.

Keywords: Final Disposal Site, Environment, Health, Community, Waste

1. Pendahuluan

Permasalahan lingkungan hidup merupakan tantangan global yang kian kompleks dan multidimensional, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah. Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang masif, serta meningkatnya konsumsi masyarakat telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan volume sampah. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk besar dan aktivitas ekonomi yang terus bertumbuh, menghadapi beban besar dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan laporan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022, jumlah timbunan sampah nasional yang tercatat dari 202 kabupaten/kota di Indonesia mencapai 21,1 juta ton. Dari angka tersebut, hanya 65,71% (sekitar 13,9 juta ton) yang terkelola, sedangkan sisanya, yaitu 34,29% atau sekitar 7,2 juta ton, belum terkelola secara optimal. Ketimpangan antara jumlah sampah yang dihasilkan dan kemampuan pengelolaannya menunjukkan bahwa permasalahan sampah bukan hanya isu teknis, tetapi juga sosial, kebijakan, dan tata kelola yang terintegrasi. Tanpa intervensi yang kuat, sistematis, dan berkelanjutan, persoalan ini akan terus memburuk dan mengancam kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan kota, keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi salah satu elemen penting namun paradoksal. Di satu sisi, TPA merupakan fasilitas yang vital untuk mengelola limbah padat yang tidak dapat diolah lebih lanjut. Di sisi lain, TPA kerap menjadi sumber permasalahan lingkungan baru, terutama jika tidak dikelola dengan standar yang memadai. Menurut Chaerul (2007), pengelolaan sampah di Indonesia menghadapi sejumlah kendala mendasar, seperti belum memadainya dasar hukum, kurangnya pengelolaan tempat pembuangan, rendahnya kegiatan pengomposan, serta tidak optimalnya pengelolaan TPA. Hal serupa juga disampaikan oleh Kardono (2007) yang menyoroti rendahnya tingkat pelayanan persampahan, terbatasnya TPA yang berstandar, serta lemahnya institusi pengelola. Tingginya volume sampah yang tidak sebanding dengan daya tampung dan daya olah TPA memperparah kondisi ini. Akibatnya, terjadi penumpukan yang tidak terkendali, pencemaran lingkungan, hingga memburuknya kondisi kesehatan masyarakat sekitar.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi dasar hukum yang penting dalam menata sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam undang-undang ini, pemerintah daerah diberi tanggung jawab untuk menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, termasuk tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan tempat pembuangan akhir (TPA). Sayangnya, implementasi di

lapangan kerap tidak sejalan dengan ketentuan normatif. Salah satu contoh konkret dapat ditemukan pada TPA Alak di Kecamatan Alak, Kota Kupang. TPA ini dibangun pada tahun 1997 dan mulai beroperasi sejak 1998 dengan luas 9,5 hektare, terdiri dari area aktif seluas 4,9 hektare dan area cadangan seluas 4,6 hektare. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Kupang tahun 2023, setiap harinya rata-rata sekitar 80–86 ton sampah dibuang ke TPA ini, mayoritas berupa sampah rumah tangga. Ironisnya, pengelolaan TPA Alak masih menggunakan sistem *open dumping*, yaitu metode pembuangan terbuka tanpa perlakuan khusus yang dapat mengurangi dampak lingkungan.

Pengamatan langsung dan wawancara yang dilakukan di sekitar kawasan TPA Alak, khususnya di Kelurahan Manulai II, menunjukkan bahwa masyarakat setempat merasakan dampak yang cukup signifikan dari keberadaan TPA tersebut. Warga mengeluhkan gangguan aktivitas harian akibat lalu lintas kendaraan pengangkut sampah yang padat, terutama dari pagi hingga malam hari. Selain itu, terdapat pula keluhan terhadap kebisingan, ceceran sampah yang menurunkan estetika lingkungan, serta bau menyengat yang timbul dari proses pembusukan sampah dan pembakaran terbuka. Beberapa warga juga menyampaikan adanya gangguan kesehatan seperti batuk, sesak napas, dan infeksi kulit akibat polusi udara dan keberadaan vektor penyakit seperti lalat dan tikus. Tidak hanya dari sisi kesehatan fisik, tetapi kenyamanan psikologis dan sosial masyarakat pun terganggu karena lingkungan tempat tinggal mereka dipersepsikan sebagai wilayah yang tidak higienis, tercemar, dan terpinggirkan secara sosial. Permasalahan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan TPA tidak hanya soal teknis infrastruktur, tetapi juga soal hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan layak.

Dampak negatif dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terhadap lingkungan sosial masyarakat tidak hanya menjadi fenomena lokal di Kota Kupang, tetapi juga merupakan isu yang telah banyak dikaji dalam berbagai konteks geografis di Indonesia. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan TPA menimbulkan berbagai konsekuensi multidimensional, terutama dalam aspek kesehatan, kenyamanan lingkungan, serta perubahan sosial masyarakat di sekitarnya. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Axmalia dan Mulasari (2020) mengungkapkan bahwa masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan TPA mengalami sejumlah gangguan kesehatan, termasuk penyakit kulit, gangguan pernapasan, hingga diare. Gangguan tersebut disebabkan oleh pencemaran lingkungan, terutama udara dan air, akibat aktivitas pembuangan dan pembusukan sampah.

Selanjutnya, Yusmiati, Maulida, dan Eriyati (2017), dalam kajian mereka di Pekanbaru, menemukan bahwa meskipun keberadaan TPA turut membuka lapangan pekerjaan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun dampaknya terhadap kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan warga tergolong signifikan. Penurunan kualitas udara, bau menyengat, serta keberadaan lalat dan serangga menjadi faktor yang mereduksi kenyamanan ruang hidup masyarakat setempat. Di sisi lain, studi oleh Muhammad Siregar (2020) mengenai TPA di Kabupaten Ponorogo menyoroti adanya pengaruh negatif terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak pemulung. Meskipun aktivitas memilah sampah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga, namun keterlibatan anak-anak dalam aktivitas pemungutan sampah berisiko terhadap hak pendidikan dan perkembangan sosial mereka.

Penelitian lain oleh Azhar Firdaus (2011) di kawasan Situ Gintung memperkaya kajian dengan menekankan adanya transformasi nilai sosial dan relasi sosial masyarakat setelah terjadi bencana lingkungan. Studi ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan aspek sosial-kultural dalam menganalisis dampak lingkungan, termasuk dalam konteks eksistensi TPA. Meskipun studi-studi terdahulu telah memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai dampak

TPA dalam berbagai dimensi, namun sebagian besar masih terbatas pada aspek kesehatan dan ekonomi. Belum banyak penelitian yang secara khusus dan mendalam mengkaji dampak TPA terhadap kenyamanan sosial dan pola relasi masyarakat, terutama di kawasan urban wilayah Indonesia Timur seperti Kota Kupang.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, kajian ini memiliki relevansi ilmiah dan posisi *state of the art* yang signifikan dalam memperluas pemahaman mengenai dampak sosial ekologis dari keberadaan TPA. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek fisik dan kesehatan semata, tetapi juga menggali bagaimana keberadaan TPA memengaruhi kenyamanan sosial, pola interaksi antarwarga, serta persepsi masyarakat terhadap ruang tempat tinggal mereka. Dengan menggunakan kerangka teori dari Sirojudin (2008), yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, kesehatan, sosial-ekonomi, dan kualitas udara, penelitian ini berupaya menghadirkan pendekatan analisis yang lebih holistik dan komprehensif. Pendekatan ini dipandang krusial dalam mengkaji fenomena TPA sebagai entitas yang tidak hanya berdampak secara ekologis, tetapi juga membawa implikasi sosiokultural yang mendalam bagi masyarakat di sekitarnya.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk merumuskan strategi pengelolaan sampah yang lebih adaptif dan partisipatif, dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam sistem tata kelola lingkungan. Kota Kupang, sebagai kota berkembang di wilayah timur Indonesia, menghadapi tekanan besar dalam manajemen sampah akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang valid dan kontekstual mengenai dampak sosial lingkungan dari keberadaan TPA, agar dapat mengambil kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam dampak keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terhadap lingkungan sosial masyarakat di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam menyusun kebijakan pengelolaan sampah yang holistik, manusiawi, dan berkelanjutan.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dampak keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terhadap lingkungan sosial masyarakat di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang terjadi, dengan mengedepankan konteks, makna, dan pengalaman subjektif masyarakat yang terdampak secara langsung (Moleong, 2017). Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena Kelurahan Manulai II merupakan wilayah yang berada paling dekat dengan TPA Alak, sehingga diduga mengalami dampak paling signifikan baik secara sosial, ekonomi, kesehatan, maupun kualitas lingkungan. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu aspek kesehatan (meliputi gangguan pernapasan dan perilaku hidup bersih), aspek sosial ekonomi (seperti peningkatan jumlah tenaga kerja informal dan pendapatan pemulung), serta aspek kualitas udara (terkait dengan pencemaran bau dan polusi).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara *purposive* dan *accidental sampling*, meliputi aparat dari Dinas Lingkungan Hidup, operator TPA, masyarakat yang terdampak, dan para pemulung yang beraktivitas di sekitar lokasi TPA, dengan total 20 informan (Sugiyono, 2017). Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, jurnal ilmiah, berita media massa, dan sumber tertulis lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat sekitar TPA, sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam terkait dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan. Dokumentasi digunakan sebagai pendukung dalam memperkuat data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara (Moleong, 2017).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman dan Saldana, 2014). Reduksi data bertujuan untuk menyaring dan menyederhanakan data mentah yang telah dikumpulkan agar lebih terfokus, sedangkan penyajian data dilakukan untuk mempermudah dalam melihat pola dan hubungan antarkategori data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara sistematis melalui proses verifikasi yang berkesinambungan selama proses penelitian berlangsung. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber, teknik, maupun waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber, triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan hasil dari berbagai metode pengumpulan data, dan triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data dalam waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi temuan (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini diyakini mampu menggambarkan realitas sosial secara utuh dan komprehensif terkait dampak keberadaan TPA terhadap masyarakat sekitar.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di tengah permukiman masyarakat merupakan persoalan lingkungan yang kompleks dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari sisi fisik, sosial, maupun kesehatan. Menurut Soemarwoto (1998), dampak dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas, baik yang bersifat alami maupun sebagai hasil intervensi manusia. Dalam konteks ini, keberadaan TPA yang berada di wilayah Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, telah lama menjadi sorotan karena pengelolaan sampah yang belum maksimal. Selain menimbulkan gangguan estetika, bau yang menyengat juga menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar, sehingga berdampak terhadap kondisi psikologis dan perilaku sosial masyarakat.

Pada awalnya, sistem pengelolaan sampah di TPA ini menggunakan metode *sanitary landfill*, yaitu proses pembuangan dan pemadatan sampah dalam cekungan tanah yang kemudian ditimbun, sehingga dapat mengurangi pencemaran tanah dan membantu proses pembusukan secara alami (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017). Namun, dalam implementasinya, metode tersebut perlahan tergantikan dengan sistem *open dumping*, yakni pembuangan sampah secara terbuka tanpa perlakuan khusus, yang justru menyebabkan penumpukan berlebih hingga over kapasitas. Kondisi ini meningkatkan risiko pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat.

Dampak fisik yang nyata dirasakan masyarakat terutama saat musim kemarau, yaitu meningkatnya pelepasan gas metana (CH_4) dari timbunan sampah akibat panas dan keberadaan material yang mudah terbakar. Hal ini terjadi karena timbunan sampah yang tidak dipadatkan membentuk pori-pori yang memungkinkan terjadinya reaksi antara gas dan udara panas, sehingga berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global (UNEP,

2010). Dampak lainnya mencakup pencemaran udara, air, dan tanah, yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Selain itu, kualitas kesehatan masyarakat juga terancam oleh paparan polusi udara dan air, serta meningkatnya potensi penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, diare, dan penyakit kulit.

Menurut Sirodjuddin (2008), keberadaan TPA dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap tiga aspek utama, yaitu kesehatan, sosial ekonomi, dan kualitas udara. Aspek kesehatan berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit, sementara aspek sosial ekonomi mencerminkan penurunan nilai ekonomi lahan sekitar TPA serta terganggunya aktivitas sosial masyarakat. Kualitas udara pun menurun drastis akibat pencemaran dari gas dan debu yang berasal dari timbunan sampah.

a. Dampak Polusi Udara terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alak

Kehidupan masyarakat di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alak, Kota Kupang, tak lepas dari bayang-bayang pencemaran udara dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Seiring berjalannya waktu, kawasan TPA bukan hanya menjadi tempat pembuangan akhir sampah, tetapi juga menjadi sumber permasalahan kesehatan yang terus berulang. Asap dari pembakaran liar, bau busuk dari tumpukan sampah organik, serta keberadaan sampah plastik yang berserakan menciptakan udara yang jauh dari kata layak hirup. Dalam kondisi tersebut, masyarakat sekitar, termasuk para pemulung, menjadi kelompok paling rentan terkena dampaknya.

1) Gangguan Kesehatan Pernapasan dan Penyakit Menular

Salah satu dampak paling mencolok dari pencemaran udara di sekitar TPA adalah meningkatnya gangguan pernapasan, terutama saat terjadi kebakaran di area TPA. Peristiwa kebakaran besar yang terjadi pada November 2023 dan kembali terulang pada Juli 2024, membuat warga dan pemulung terpapar asap tebal selama berhari-hari. Banyak di antara mereka mengalami batuk berkepanjangan, sesak napas, dan gangguan pada saluran pernapasan lainnya.

Yakobus Peloedo, seorang pemulung yang telah belasan tahun tinggal dan bekerja di kawasan TPA, menyampaikan bahwa dirinya dan keluarganya terbiasa hidup dalam lingkungan yang jauh dari bersih. Ia mengaku sering mengalami penyakit diare, dan kondisi kulit yang gatal akibat kurangnya kebersihan serta paparan alat yang terus-menerus hinggap di tubuh dan makanan. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak pernah menggunakan masker, sarung tangan, atau alas kaki khusus. Bahkan, makanan yang dikonsumsi sehari-hari pun terkadang sudah dihindari lalat sebelum dimakan, namun hal itu dianggap biasa (wawancara, 30 September 2024).

Sementara itu, Kevin Tualaka, seorang pemulung remaja yang juga masih bersekolah, mengungkapkan bahwa ia dan teman-teman sebayanya sudah terbiasa memulung tanpa mengenakan pelindung diri. Masker dan sarung tangan jarang dipakai karena mereka lebih fokus mengumpulkan sampah plastik untuk dijual, agar bisa mendapatkan uang saku tambahan. Menurutnya, hanya sedikit pemulung yang peduli soal perlindungan kesehatan, karena pekerjaan memulung sudah menjadi rutinitas harian (wawancara, 1 Oktober 2024).

Senada dengan itu, Ibu Marta Felpina, warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi TPA, menyampaikan keprihatinannya atas rendahnya kesadaran para pemulung dalam menjaga kesehatan. Ia bahkan pernah melihat pemulung yang masih mengonsumsi makanan sisa yang sudah dibuang ke tempat sampah, dan menganggapnya sebagai hal lumrah. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka mengalami diare dan sakit perut. Menurutnya, makanan bekas tersebut

seharusnya tidak dikonsumsi oleh manusia karena sudah terkontaminasi kuman dan kotoran (wawancara, 1 Oktober 2024).

Ibu Sarci, salah seorang pemulung senior, turut mengakui bahwa ia dan rekan-rekannya terbiasa memulung dengan perlengkapan seadanya. Sarung tangan hanya digunakan saat sangat diperlukan, dan masker hampir tidak pernah ia gunakan. Bau busuk dari sampah sudah menjadi bagian dari keseharian yang menurutnya “tidak bisa dihindari lagi”. Ia pun menyebutkan bahwa gatal-gatal di tubuh sering muncul setelah seharian bekerja, namun hal tersebut dianggap sebagai risiko biasa dari pekerjaan yang dijalani (wawancara, 12 Mei 2025).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Kupang, jumlah kasus diare pada tahun 2023 tercatat sebanyak 3.653 kasus, dan meskipun menurun menjadi 1.030 kasus pada tahun 2024, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa penyakit berbasis lingkungan masih menjadi masalah serius. Tumpukan sampah yang tidak terkelola, asap dari pembakaran, dan kurangnya perlindungan diri menjadi faktor dominan yang mendorong penyebaran penyakit seperti diare, batuk kronis, gatal-gatal, bahkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

2) Rendahnya Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Di tengah lingkungan yang terpapar risiko tinggi, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) seharusnya menjadi prioritas. Namun, kondisi di sekitar TPA Alak menunjukkan hal sebaliknya. Rendahnya penerapan PHBS tampak dari kebiasaan para pemulung dan warga sekitar yang tidak mencuci tangan setelah bekerja, tidak membersihkan tubuh secara rutin, serta menggunakan pakaian kerja berulang kali tanpa dicuci. Ketiadaan akses air bersih, fasilitas sanitasi, dan edukasi kesehatan menjadi penyebab utama rendahnya kesadaran tersebut.

Nova Neolaka, seorang ibu pemulung, menyatakan bahwa ia hanya menggunakan sarung tangan untuk menghindari luka akibat benda tajam seperti pecahan kaca. Namun, penggunaan masker jarang dilakukan, karena bau sampah dianggap sudah menjadi hal yang biasa. Ia juga mengakui sering mengalami gatal-gatal di kulit, yang kemungkinan besar disebabkan oleh kurang bersihnya tubuh dan pakaian setelah bekerja (wawancara, 12 Mei 2025).

Dalam wawancara yang sama, Ibu Sarci kembali menegaskan bahwa pemulung terbiasa menggunakan peralatan seadanya seperti sarung tangan bekas, sepatu karet, dan topi untuk melindungi diri dari panas. Menurutnya, penggunaan masker tidak dianggap penting oleh sebagian besar pemulung karena mereka sudah terbiasa dengan kondisi lingkungan yang kotor dan berbau (wawancara, 12 Mei 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pemulung tidak menjadikan kebersihan diri sebagai prioritas, bahkan cenderung menormalisasi situasi lingkungan yang penuh risiko. Kurangnya akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi juga turut memperburuk keadaan. Padahal, penerapan PHBS yang sederhana seperti mencuci tangan, mandi setelah bekerja, atau mengenakan alat pelindung diri dapat menjadi langkah awal yang sangat penting dalam mencegah penyakit. Melihat situasi ini, pemerintah dan instansi terkait perlu hadir secara lebih aktif melalui penyediaan sarana kesehatan dasar, program edukasi lapangan, serta pendampingan berkelanjutan kepada masyarakat sekitar TPA. Tanpa dukungan dan tindakan nyata dari pihak berwenang, kondisi kesehatan masyarakat di lingkungan TPA Alak akan terus memburuk dan memperparah ketimpangan sosial-ekologis yang sudah terjadi sejak lama.

b. Sosial Ekonomi

Aspek sosial ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam konteks ini, keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alak tidak hanya berfungsi sebagai tempat akhir pembuangan sampah, tetapi juga menjadi sumber penghidupan alternatif bagi kelompok masyarakat tertentu, khususnya mereka yang berada dalam kategori ekonomi lemah dan sulit mengakses sektor kerja formal.

1) Peningkatan Tenaga Kerja Pemulung.

Keberadaan TPA Alak telah menciptakan lapangan kerja informal bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Tercatat bahwa selain petugas resmi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Kupang—yang terdiri atas tiga orang operator alat berat dan tiga orang staf—terdapat pula sejumlah besar pemulung yang terlibat dalam kegiatan pemilahan sampah di lokasi tersebut (DLHK, wawancara, 30 September 2024). Para pemulung ini berasal dari berbagai wilayah, baik dari dalam maupun luar kawasan TPA, dan mereka memanfaatkan peluang ini untuk mengumpulkan barang-barang bernilai ekonomis seperti botol plastik, kardus, aluminium, serta besi bekas.

Sebagaimana diungkapkan oleh Pilipus, salah seorang pemulung, pekerjaan ini memberikan penghasilan meskipun membutuhkan ketekunan dan tenaga ekstra karena persaingan dengan pemulung lainnya semakin meningkat (wawancara, 30 September 2024). Hal serupa juga disampaikan oleh Arnoldus, pensiunan berusia 52 tahun, yang memilih menjadi pemulung untuk menambah penghasilan di masa tua (wawancara, 30 September 2024). Yasintus Kosat menambahkan bahwa aktivitas memulung merupakan satu-satunya sumber pendapatan bagi keluarganya, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak (wawancara, 12 Mei 2025). Sementara itu, Albertus Maukolo menyatakan bahwa pekerjaan ini telah membantunya menyekolahkan anak-anaknya hingga tamat jenjang pendidikan menengah, meskipun ia sendiri tidak mengenyam pendidikan tinggi (wawancara, 12 Mei 2025).

Bahkan dalam konteks kerentanan usia lanjut, aktivitas memulung tetap menjadi pilihan realistis. Hal ini diungkapkan oleh Selvince Manafe, seorang pemulung berusia 79 tahun, yang bekerja setiap hari demi membantu kebutuhan anak dan cucunya (wawancara, 12 Mei 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan TPA telah membuka ruang partisipasi ekonomi bagi berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial.

Namun demikian, pekerjaan ini sarat risiko. Minimnya perlindungan kerja, keterbatasan alat pelindung diri, serta ketiadaan jaminan sosial menyebabkan para pemulung, khususnya lansia, berada dalam posisi rentan secara sosial dan kesehatan. Oleh karena itu, intervensi dari pemerintah daerah dalam bentuk pelatihan kerja, penyediaan fasilitas sanitasi, ruang istirahat, serta air bersih mutlak diperlukan guna mendukung terciptanya kondisi kerja yang layak dan manusiawi.

2) Penambahan Pendapatan Keluarga.

Kegiatan pemilahan sampah oleh pemulung tidak hanya menjadi pekerjaan utama, tetapi juga berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan bagi sejumlah keluarga. Berdasarkan wawancara dengan sepuluh orang pemulung, sebagian besar dari mereka berusia antara 40 hingga 54 tahun, berlatar belakang pendidikan rendah, dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Oleh karena itu, aktivitas memulung menjadi alternatif ekonomi yang logis dalam konteks keterbatasan akses pekerjaan (Wawancara, 01 Oktober 2024).

Menurut Meksy Soleman Pingak, M.PH selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah DLHK, kegiatan ini juga terintegrasi dengan program pengelolaan sampah organik yang bekerja sama dengan Koperasi Pustim NTT. Koperasi tersebut memberi kesempatan bagi para pemulung untuk menabung berdasarkan hasil kerja mereka dalam mengumpulkan dan mengelola sampah (wawancara, 30 September 2024).

Beberapa informan mengungkapkan pengalaman serupa. Teroci, yang telah bekerja sebagai pemulung selama 15 tahun, menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh pendapatan berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 150.000 setiap 1 hingga 2 minggu dari hasil pengumpulan kardus dan botol plastik. Namun, untuk barang bernilai tinggi seperti aluminium, waktu pengumpulan bisa mencapai lima hingga enam bulan (wawancara, 01 Oktober 2024). Paulina Lasa, yang sebelumnya berjualan sayur, memilih menjadi pemulung sejak tahun 2017 karena dianggap memberikan hasil yang lebih baik (wawancara, 01 Oktober 2024). Hal serupa diutarakan oleh Weli Seko dan suaminya yang beralih menjadi pemulung karena keterbatasan penghasilan dari pekerjaan konstruksi (wawancara, 01 Oktober 2024). Welmince dan Norlina Neolaka juga menyatakan bahwa meskipun hasil memulung tidak besar, namun cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka (wawancara, 12 Mei 2025).

Data berikut merupakan gambaran pendapatan dan harga jual dari beberapa jenis sampah yang umum dikumpulkan oleh pemulung di TPA Alak:

No	Jenis Sampah	Harga per Kg	Waktu Pengumpulan	Jumlah Rata-rata	Perkiraan Pendapatan
1	Botol Plastik	Rp 2.000	1–3 minggu	90–100 Kg	Rp 200.000
2	Besi	Rp 4.000 – Rp 5.000	2–3 minggu	50–70 Kg	Rp 300.000
3	Aluminium/Kaleng	Rp 14.000 – Rp 15.000	2–3 bulan	40–60 Kg	Rp 850.000
4	Kardus Bekas	Rp 2.000	1–2 minggu	2–3 ikat	Rp 150.000

Dari data dan wawancara yang dihimpun, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sebagai pemulung berperan signifikan dalam menopang ketahanan sosial-ekonomi keluarga miskin di sekitar TPA Alak. Meskipun pekerjaan ini tidak memiliki kepastian pendapatan yang tinggi, keberadaannya memberikan ruang bagi masyarakat marginal untuk tetap produktif dan berdaya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan terpadu dari pemerintah daerah, koperasi, serta lembaga non-pemerintah dalam mengembangkan ekosistem pemulung yang lebih terstruktur, sehat, dan berkelanjutan (DLHK, wawancara, 30 September 2024; Norlina Neolaka, wawancara, 12 Mei 2025).

Dengan demikian, TPA Alak bukan semata menjadi lokasi pembuangan sampah, tetapi telah menjelma menjadi arena perjuangan ekonomi yang nyata bagi masyarakat yang termarginalkan oleh sistem kerja formal.

c. Kualitas Udara

Kualitas udara di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alak, yang terletak di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, menggambarkan kondisi lingkungan yang kian memburuk akibat aktivitas pengelolaan sampah yang tidak terkontrol. Aktivitas yang berlangsung setiap hari di lokasi ini, mulai dari pembuangan, penumpukan, hingga pembakaran sampah secara terbuka, menciptakan emisi berbahaya yang mencemari atmosfer dan memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat sekitar. Dampak tersebut dirasakan lebih intens oleh kelompok pemulung dan warga yang tinggal di radius dekat dengan area TPA.

1) Polusi Udara dari Asap Pembakaran dan Debu.

Salah satu sumber pencemaran udara paling mencolok di kawasan TPA adalah praktik pembakaran sampah secara terbuka yang kerap dilakukan untuk mengurangi volume limbah. Praktik ini menghasilkan asap pekat yang menyebar luas ke lingkungan sekitar dan membawa serta partikel-partikel berbahaya yang dapat masuk ke saluran pernapasan manusia. Kondisi tersebut menjadi sangat parah ketika terjadi kebakaran besar di lokasi TPA. Dalam dua kejadian terpisah yang pernah terjadi, asap menyelimuti area sekitar hingga dua hari berturut-turut, menyebabkan aktivitas warga dan pemulung terhenti akibat sulitnya bernapas serta menimbulkan iritasi pada mata.

Ibu Teroci, salah satu pemulung yang bekerja setiap hari di TPA, menuturkan bahwa dirinya telah terbiasa dengan paparan debu saat memilah sampah, terutama ketika truk-truk pengangkut datang dan menimbulkan pusaran debu di sekitar lokasi. Namun, ia menegaskan bahwa asap dari pembakaran jauh lebih menyulitkan. Ia mengatakan, “Kalau debu sudah biasa, tapi asap itu bikin mata perih dan dada sesak. Kalau sampah basah dibakar, asapnya tebal dan bikin kabut” (wawancara, 1 Oktober 2024).

Pengalaman serupa juga diungkapkan oleh Bapak Yakobus Peloedo, pemulung lainnya, yang bahkan pernah kehilangan lapak usahanya akibat kebakaran yang terjadi di area tempat ia menyimpan limbah plastik. Ia menjelaskan, “Waktu itu asap sangat tebal, kami tidak bisa kerja dua hari. Banyak teman juga sakit kepala dan batuk. Saya sendiri tidak bisa tidur karena dada terasa berat” (wawancara, 1 Oktober 2024). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pencemaran udara yang dihasilkan bukan hanya bersifat gangguan temporer, tetapi telah menciptakan kondisi kesehatan yang mengancam dan berulang.

Selain asap pembakaran, lalu lintas kendaraan pengangkut sampah juga turut menjadi penyumbang pencemaran udara. Truk-truk yang melintasi jalan tanah di sekitar lokasi TPA menyebabkan debu beterbangan dan tersebar luas, terutama saat cuaca kering. Debu-debu ini mengandung partikel berbahaya dari sisa pembakaran atau tumpukan limbah dan dapat dengan mudah terhirup oleh masyarakat. Liliweri (2013) menjelaskan bahwa partikel kecil di udara yang berasal dari polusi lingkungan, khususnya debu, berpotensi menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis.

2) Pencemaran Udara dari Pembusukan dan Limbah Cair.

Bau menyengat merupakan bentuk pencemaran udara yang paling konsisten dirasakan oleh masyarakat dan pemulung di sekitar TPA. Proses pembusukan limbah organik, terutama sisa makanan dan bahan mudah terurai lainnya, menghasilkan senyawa kimia seperti amonia dan hidrogen sulfida yang menguap dan menyebabkan bau busuk menyebar ke area permukiman. Kondisi ini semakin diperburuk ketika hujan turun dan menciptakan lindi, yaitu cairan hasil rembesan sampah, yang mempercepat proses pembusukan dan pelepasan gas-gas berbahaya.

Ibu Norlina Neolaka, salah seorang pemulung, menyampaikan bahwa meskipun tidak ada pembakaran, bau busuk tetap menyeruak setiap hari. Ia menyatakan, “Bau busuk itu ada terus, bahkan saat tidak hujan atau tidak ada pembakaran. Namanya sampah, kalau sudah lama tumpuk, pasti bau. Setiap hari saya rasakan” (wawancara, 12 Mei 2025).

Ibu Sarci menambahkan bahwa bau tersebut sering kali sangat menyengat, terutama saat angin berembus ke arah permukiman. “Saat angin kencang, baunya sampai ke rumah warga. Kadang

sampai bikin mual dan pusing. Sudah biasa tapi tetap saja mengganggu,” katanya (wawancara, 12 Mei 2025).

Kontribusi pencemaran juga datang dari limbah cair yang dibuang ke lingkungan terbuka, termasuk limbah dari industri kecil seperti pabrik tahu yang disebutkan oleh warga setempat. Limbah air bekas cucian kacang kedelai yang dibuang ke sekitar lokasi TPA mempercepat pembusukan organik dan memperburuk intensitas bau. Daryanto (2016) menjelaskan bahwa akumulasi limbah organik cair dapat menciptakan sumber emisi gas yang lebih luas dan sulit dikendalikan, terutama dalam kondisi lingkungan terbuka tanpa sistem drainase.

Bapak Yasintus Kosat, pemulung lain yang diwawancarai pada hari yang sama, menyatakan bahwa pencemaran bau bersifat konstan. Ia menuturkan, “Tidak perlu tunggu hujan atau panas, tiap hari bau tetap ada. Kadang makin parah kalau cuaca panas karena sampah cepat busuk. Itu sudah makanan sehari-hari kami di sini” (wawancara, 12 Mei 2025).

Lebih lanjut, Dampak pencemaran udara tidak hanya terasa pada aspek kenyamanan, tetapi juga membahayakan kesehatan. Masyarakat dan pemulung melaporkan berbagai keluhan kesehatan, mulai dari batuk, sesak napas, iritasi mata, pusing, hingga mual dan diare. Kelompok paling rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil menjadi pihak yang paling terdampak. Minimnya kesadaran penggunaan alat pelindung diri (APD) dan tidak adanya pengawasan dari pihak pengelola memperburuk situasi ini.

Berdasarkan observasi di lapangan, sebagian besar pemulung bekerja tanpa masker, sarung tangan, atau pelindung lainnya, bahkan di tengah kondisi udara yang jelas-jelas tidak sehat. Hal ini menunjukkan kurangnya intervensi struktural dari pemerintah untuk memberikan perlindungan dasar terhadap kelompok pekerja informal yang paling terpapar pencemaran lingkungan.

3) Ketidakefisienan Pengendalian Polusi Bau.

Pencemaran bau merupakan bentuk paling dominan dari penurunan kualitas udara di TPA Alak. Gas-gas hasil dekomposisi limbah organik menyebar dengan cepat, apalagi ketika tidak ada sistem pengelolaan sampah yang efektif. Putra (2015) mencatat bahwa bau dari limbah organik bukan hanya menurunkan kenyamanan, tetapi juga dapat menimbulkan stres psikologis dan gangguan psikosomatis jika terpapar dalam jangka panjang.

Ketiga narasumber yang diwawancarai pada tanggal 12 Mei 2025 secara konsisten menyampaikan bahwa bau menyengat adalah masalah utama yang mereka hadapi sehari-hari. Pernyataan mereka mengindikasikan bahwa pencemaran bau bukan kejadian insidental, melainkan kondisi permanen yang terjadi sepanjang tahun dan belum ditangani secara serius oleh pihak terkait.

3.2 Pembahasan

Penelitian ini memotret secara mendalam kompleksitas dampak sosial, kesehatan, dan ekologis dari keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alak di Kota Kupang. Dalam perspektif tata kelola kota berkelanjutan, TPA semestinya menjadi terminal pengelolaan sampah yang memenuhi standar teknis dan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, TPA Alak mengalami pergeseran fungsi: dari sekadar ruang teknis menjadi lanskap sosial-ekologis yang mencerminkan kegagalan sistemik dalam manajemen lingkungan serta reproduksi ketimpangan sosial yang struktural.

Secara faktual, sistem pengelolaan sampah di TPA Alak telah mengalami kemunduran dari praktik *sanitary landfill* menuju *open dumping*. Perubahan ini membawa konsekuensi ekologis yang serius—pencemaran udara akibat pembakaran terbuka, penurunan kualitas air tanah, dan degradasi tanah secara umum. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan sistem monitoring dan pengawasan yang memadai. Bau busuk yang menyengat dan asap pembakaran menjadi pemicu utama gangguan kesehatan masyarakat, terutama di musim kemarau ketika emisi meningkat dan angin membawa polutan ke permukiman. Informan lapangan seperti Norlina Neolaka menyebut bahwa keluarganya kerap mengalami sesak napas dan mual akibat bau yang menyengat. Hal serupa diungkapkan oleh Sarci, seorang pemulung, yang menyatakan bahwa ia terus bekerja tanpa alat pelindung diri karena faktor biaya dan tidak adanya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait.

Temuan empiris ini senada dengan studi Axmalia dan Mulasari (2020), yang menunjukkan bahwa keberadaan TPA dengan sistem terbuka meningkatkan risiko gangguan saluran pernapasan atas (ISPA), penyakit kulit, hingga tekanan psikologis. Dalam studi serupa di TPA Sarimukti, Alfian dan Phelia (2021) mengidentifikasi bahwa lemahnya pengangkutan dan sistem pengelolaan limbah berdampak langsung pada kualitas hidup warga sekitar. Pencemaran udara akibat pembakaran sampah terbuka juga dilaporkan di TPA Air Sebakul Bengkulu (Putri et al., 2020), dengan hasil menunjukkan adanya kandungan senyawa berbahaya seperti karbon monoksida dan sulfur dioksida di udara sekitar.

Kondisi ekologis yang tercemar tersebut memiliki implikasi sosial yang lebih dalam. TPA Alak bukan hanya menjadi pusat produksi limbah, tetapi juga ruang ekonomi alternatif bagi masyarakat marginal yang tersingkir dari pasar kerja formal. Informan seperti Yasintus Kosat dan Selvince Manafe (79 tahun) menggambarkan aktivitas memulung sebagai sumber penghidupan utama dengan penghasilan yang sangat tidak menentu, antara Rp 20.000 hingga Rp 150.000 per tiga hari. Aktivitas ini mencerminkan *agency* sosial-ekonomi dalam situasi keterdesakan struktural. Sejalan dengan pandangan Appadurai (1986) tentang *the social life of things*, nilai ekonomi diciptakan bukan dari material itu sendiri, tetapi dari proses sosial yang membentuknya. Sampah menjadi “komoditas” bagi mereka yang mampu memanfaatkannya, meskipun dalam kondisi kerja yang rentan dan tanpa perlindungan sosial.

Temuan ini juga mengkonfirmasi hasil penelitian Nasution (2020) yang menjelaskan bagaimana para pemulung membentuk sistem ekonomi informal di TPA Mrican, Ponorogo, serta Ramadhani et al. (2025) di TPA Cipayung yang menemukan korelasi antara keberadaan TPA dan ketahanan ekonomi komunitas marginal. Namun, bersamaan dengan itu, mereka berada dalam sistem kerja yang minim standar keselamatan dan terpapar secara langsung terhadap limbah beracun dan penyakit menular, sebagaimana dikritisi oleh Annidia et al. (2023).

Pendekatan ekologi sosial menjadi relevan dalam membaca persoalan ini. Tidak cukup hanya mengandalkan solusi teknologi seperti penambahan *incinerator* atau pemadat sampah, tetapi perlu dilakukan rekonstruksi sistemik yang menyentuh aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat terdampak. Misalnya, hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi yang layak, dan edukasi mengenai risiko lingkungan. Dalam konteks ini, pendekatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) tidak akan efektif tanpa memperbaiki struktur penyangganya. Sebagaimana diingatkan Axmalia dan Mulasari (2020), perubahan perilaku tidak akan terjadi dalam ruang sosial yang tidak mendukung praktik sehat secara struktural.

Secara teoretis, kondisi ini menjadi antitesis dari teori fungsionalisme struktural yang menganggap bahwa semua institusi sosial bekerja demi menjaga keseimbangan masyarakat. TPA, dalam hal ini, justru memproduksi disfungsi ekologis dan sosial yang saling menguatkan. Dalam kerangka *habitus* Bourdieu, perilaku masyarakat yang tampak “acuh” terhadap kesehatan merupakan cerminan disposisi sosial yang dibentuk oleh tekanan ekonomi dan keterbatasan pilihan. Mereka hidup dalam ekosistem yang memaksa untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan naratif-kualitatif yang memperlihatkan pengalaman subjektif masyarakat terdampak. Berbeda dari kebanyakan studi sebelumnya yang bersifat kuantitatif dan berfokus pada parameter teknis, studi ini menyajikan narasi hidup dari aktor-aktor lokal yang selama ini luput dari perhatian kebijakan. Pendekatan ini memperkaya pemahaman sosiologis terhadap ruang limbah sebagai *arena kontestasi sosial-ekologis*, dan mengafirmasi perlunya kebijakan berbasis data lapangan yang partisipatif dan kontekstual.

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini cukup luas. Pemerintah daerah didesak untuk mengadopsi kebijakan pengelolaan limbah yang berbasis keberlanjutan dan keadilan sosial. Reformasi TPA harus mencakup pelarangan praktik pembakaran terbuka, penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi pemulung, pembangunan pusat kesehatan di sekitar lokasi, serta integrasi pemulung dalam sistem ekonomi daur ulang formal. Studi oleh Kusman et al. (2023) dan Rahayona et al. (2023) menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan sampah justru meningkatkan efektivitas program pemerintah dan memperkuat ketahanan lingkungan.

Dengan demikian, TPA Alak tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai lokasi teknis penanganan limbah. Ia adalah ruang sosial-ekologis yang kompleks, penuh kontradiksi, namun juga penuh potensi untuk perubahan. Intervensi di wilayah ini harus bersifat lintas sektor, menggabungkan perspektif lingkungan, kesehatan masyarakat, sosiologi ekonomi, serta partisipasi warga, demi mewujudkan pembangunan kota yang adil, sehat, dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami secara mendalam dampak multidimensional dari keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alak di Kota Kupang terhadap masyarakat di sekitarnya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana aspek lingkungan, kesehatan, dan sosial ekonomi dipengaruhi oleh praktik pengelolaan sampah di lokasi tersebut.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa TPA Alak tidak sekadar berfungsi sebagai ruang teknis untuk pembuangan akhir limbah, tetapi telah menjelma menjadi arena sosial-ekologis yang sarat persoalan struktural. Pergeseran sistem pengelolaan dari metode *sanitary landfill* menuju *open dumping* telah memperburuk kualitas lingkungan secara signifikan. Polusi udara akibat pembakaran terbuka, pencemaran tanah dari tumpukan sampah yang tidak terkelola, serta lindi yang merembes ke air tanah menciptakan kondisi ekologis yang semakin memburuk dan tidak berkelanjutan.

Dampak ekologis tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat. Berbagai keluhan seperti infeksi saluran pernapasan, diare, penyakit kulit, dan gangguan psikosomatik muncul sebagai akibat dari paparan jangka panjang terhadap polutan, bau busuk, dan sanitasi yang tidak memadai. Minimnya akses terhadap alat pelindung diri serta rendahnya penerapan perilaku

hidup bersih dan sehat (PHBS) memperkuat kerentanan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok pemulung dan warga yang tinggal di sekitar TPA.

Pada saat yang sama, TPA Alak juga mencerminkan dinamika sosial ekonomi masyarakat miskin kota. Bagi sebagian besar pemulung, tempat ini menjadi ruang ekonomi alternatif dalam keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal. Aktivitas memulung yang dijalankan dalam kondisi kerja yang tidak layak, tanpa jaminan keselamatan maupun proteksi sosial, memberikan bukti bahwa masyarakat marginal telah menciptakan bentuk ketahanan ekonomi sendiri di tengah keterdesakan. Pendapatan dari kegiatan ini mungkin tidak besar, tetapi cukup untuk menopang kebutuhan dasar sehari-hari, termasuk pembiayaan pendidikan anak-anak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan TPA Alak melampaui isu teknis pengelolaan sampah. Ia merupakan representasi dari ketimpangan struktural dalam tata kelola kota yang gagal mengintegrasikan aspek keberlanjutan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak cukup bersifat teknokratik, melainkan harus melibatkan pendekatan lintas sektor yang holistik dan inklusif. Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan pengelolaan limbah yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknis, tetapi juga mengedepankan keadilan sosial dan partisipasi aktif masyarakat terdampak.

Daftar Pustaka

- Alfian, R., & Phelia, A. (2021). Evaluasi efektivitas sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah di TPA Sarimukti Kota Bandung. *JICE (Journal of Infrastructure and Civil Engineering)*. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id>
- Annidia, F. S., Rahiem, M. D. H., & lainnya. (2023). Dampak sosial ekonomi dari pendirian tempat pemrosesan akhir (TPA) dan pemrosesan sampah bagi masyarakat Cipayung, Depok, Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Sosial Humaniora*. <https://researchgate.net>
- Appadurai, A. (1986). *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective*. Cambridge University Press.
- Axmalia, A., & Mulasari, S. A. (2020). Dampak tempat pembuangan akhir sampah (TPA) terhadap gangguan kesehatan masyarakat. *Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health)*, 6(2), 123–130. <https://jurnal.htp.ac.id>
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice* (R. Nice, Trans.). Stanford University Press.
- Chaerul, M. (2007). Permasalahan dan kebijakan pengelolaan persampahan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 8(1), 1–10.
- Daryanto. (2016). *Teori Komunikasi*. Gava Media.
- Firdaus, A. (2011). Transformasi nilai sosial masyarakat pasca bencana lingkungan: Studi kasus di kawasan Situ Gintung. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 5(2), 201–215.
- Kardono, P. (2007). Permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia. *Jurnal Permukiman Natak*, 5(2), 45–52.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). *Panduan Teknis Pengelolaan Sampah dengan Metode Sanitary Landfill*. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. <https://sipsn.menlhk.go.id>

- Kusman, M. R., Aswan, M., & lainnya. (2023). Evaluasi sistem pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) Desa Dehegila Kabupaten Pulau Morotai. *Journal Collaboration of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 55–68. <https://journal-iasssf.com>
- Liliweri, A. (2013). *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*. Pustaka Pelajar.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. S. (2020). Dampak sosial TPA terhadap kehidupan pemulung dan pendidikan anak di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(1), 64–75.
- Nasution, R. D. (2020). Dampak sosial ekonomi tempat pembuangan akhir (TPA) bagi pemulung desa Mrican Ponorogo. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 4(1), 76–85. <https://journal.untar.ac.id>
- Putra, M. I. (2015). *Pengelolaan Sampah Organik dan Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Putri, H. D. V. S., Sakti, N., & lainnya. (2020). Pengaruh tempat pembuangan akhir (TPA) terhadap pencemaran udara di lingkungan Sebakul Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 2(1), 44–51. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id>
- Ramadhani, R., Nurhangesti, M., & lainnya. (2025). Dampak aktivitas TPA terhadap lingkungan: Pendekatan kualitatif deskriptif di kawasan Cipayung Depok. *Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Sosial*, 5(1), 112–123. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id>
- Rahayona, D., Sunarsih, E., & Egit, K. F. (2023). Analisis kualitas lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat di sekitar TPA Sukawinatan Palembang. *HIGIENE: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 4(2), 89–101. <https://tes-ojs.uin-alauddin.ac.id>
- Sirodjuddin, A. (2008). Dampak Lingkungan dan Sosial Tempat Pembuangan Akhir. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3(1), 45–53.
- Sirojudin, A. (2008). Kajian dampak keberadaan TPA terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitarnya. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 6(2), 134–142.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- UNEP. (2010). *Waste and Climate Change: Global Trends and Strategy Framework*. United Nations Environment Programme. <https://www.unep.org>
- Yusmiati, Y., Maulida, I., & Eriyati, E. (2017). Analisis dampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terhadap kesehatan dan kenyamanan lingkungan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 11(2), 155–162.